

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perang sipil di Suriah yang sangat gencar diberitakan sejak 2011 melalui media masa ataupun media elektronik telah menarik perhatian banyak orang tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Suriah belakangan ini. Terutama ketika media memberitakan tentang perang yang tak henti-hentinya serta kejahatan-kejahatan perang yang menimpah masyarakat Suriah, seperti isu yang paling meresahkan masyarakat internasional akhir-akhir ini adalah isu para *refugee* Suriah, dimana para korban perang sipil di Suriah beramai-ramai meninggalkan Suriah menuju Eropa untuk menyelamatkan diri. Kekacauan-kekacauan akibat Perang di Suriah merucutkan perhatian kepada sosok Presiden Suriah yang merupakan sosok yang dapat dipertanyakan keberadaan serta perannya saat Suriah sedang kacau Balau seperti sekarang ini.

Bashar Al-Assad merupakan presiden ke-2 Suriah yang memegang tampuk pemerintahan sejak tahun 2000. Bashar merupakan doktor ahli mata (ophthalmologist) yang mendapatkan pendidikannya di Inggris, latar belakang pendidikan yang bukan militer menyebabkan Bashar tidak banyak mendapatkan pendidikan politik ataupun militer selama hidupnya. Pada awal pencalonan dirinya sebagai presiden banyak masyarakat Suriah yang percaya bahwa Bashar Al-Assad

merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Hafez Al-Assad, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan Bashar Al-Assad yang pernah menimba ilmu di London menimbulkan harapan masyarakat Suriah bahwa Bashar akan bersifat lebih moderat, menerapkan demokrasi di Suriah serta melakukan perbaikan ekonomi. Tetapi setelah 5 tahun Bashar memimpin tak banyak harapan itu terwujud, bahkan banyak masyarakat yang kemudian kecewa atas kepemimpinan Bashar Al-Assad.

Secara garis keturunan Bashar Al-Assad merupakan anak dari presiden Suriah sebelumnya yaitu Hafez Al-Assad. Hafez Al-Assad memegang kekuasaan di Suriah selama 30 tahun dimulai sejak 1970-2000, Hafez berhenti mejadi presiden saat kematiannya yaitu pada 10 juni 2000. Sebulan setelah kematian Hafez Al-Assad kekuasaan jatuh ditangan Bashar Al-Assad. Jabatan sebagai presiden ini di dapat dari hasil referendum yang juga dilaksanakan sebulan setelah kematian Hafez Al-Assad dimana Bashar mendapatkan 97% suara dan seminggu kemudian Bashar segera dilantik menjadi Presiden Suriah.

Banyak ahli yang menekankan bahwa Hafez Al-Assad telah mengatur anaknya menjadi penerusnya, dan terdapat implikasi bahwa para pengikut Hafez Al-Assad di pemerintahan tidak ragu mejadikan Bashar Al-Assad menjadi presiden¹.

1

Stacher, J. (2011). Reinterpreting Authoritarian Power : Syria's Heredity Succession. *the middle east journal*, 200.

Keputusan Hafedz Al-Assad menunjuk Bashar sebagai penggantinya merupakan keputusan akhir Hafedz sebelum kematiannya di tahun 2000, keputusan penunjukan Bashar ini juga merupakan keputusan yang tak terduga karena selama hidupnya Hafedz telah menyiapkan anak tertuanya yang bernama Basil Al-Assad untuk menempati tampuk kekuasaannya, Hafedz menyiapkan Basil dengan banyak memberinya pengalaman mengenai militer dan keamanan negara namun rencana Hafedz tak berjalan sesuai dengan kenyataan dimana pada 1994 Basil meninggal dalam kecelakaan mobil. Dengan adanya kejadian tersebut Hafedz memutuskan untuk memanggil Bashar yang sedang belajar mengenai mata di London dan tentunya menunjuk Bashar untuk mengambil alih kekuasaannya.

Bashar Al-Assad berasal dari sekte Alawi serta penganut Syi'ah yang merupakan salah satu etnis minoritas di Suriah. Dalam kepemimpinannya Bashar menghadapi berbagai macam bentuk tekanan baik itu tekanan eksternal maupun internal. Bashar yang telah memimpin Suriah selama 15 Tahun sejak tahun 2001-2016 dengan sedikit pengalaman dalam bidang militer dan bidang keamanan negara menjalankan bentuk pemerintahan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Suriah yang mengharapkan perubahan setelah terpilihnya Bashar sebagai presiden. Hal ini banyak menyebabkan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad.

Dalam kepemimpinannya Bashar menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Dari segi eksternal tekanan muncul dari Amerika Serikat yang merupakan

salah satu negara yang menentang rezim Bashar Al-Assad bersama Arab Saudi, Irak. Negara-negara ini melakukan embargo dalam bidang perdagangan di Suriah. Dari segi internal tekanan bermunculan dari oposisi seperti Free Syrian Army serta Syirian National Council (SNC) yang menentang pemerintahannya. Bashar mendapatkan tekanan dari dunia internasional untuk meletakkan jabatannya dan menghentikan kejahatan perang di Suriah, selain masalah eksternal juga terdapat berbagai masalah internal terutama masalah sekterianisme dimana masyarakat Suriah yang mayoritas Sunni menolak untuk berada dibawah kepemimpinan Syiah yang merupakan minoritas di Suriah, adanya sensitifitas mengenai Sekterianisme dalam kepemimpinan di Suriah juga mempengaruhi berbagai oposisi pemerintahan yang berasal dari berbagai kalangan seperti *Free Surian Army* yang diisi oleh mayoritas Sunni atau ISIS yang diisi oleh orang-orang yang berkeinginan mengambil alih kekuasaan untuk mendirikan negara Islam di Suriah

Suriah secara konstitusional merupakan negara demokrasi namun dalam praktiknya Suriah tidak menjamin nilai-nilai demokrasi. Selain tidak adanya pemilihan umum yang adil, jujur, dan terbuka di Suriah yang menunjukkan bahwa Suriah merupakan negara demokrasi ada beberapa hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi diantaranya pelarangan terhadap Organisasi independen dengan tidak diberikan izin untuk beroperasi secara legal dan terus menerus mengalami pengawasan yang ketat² selain itu juga adanya

ancaman kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pemerintah, sebagai contoh kasus Ma'mun al-Homsi yang dipenjarakan setelah menyuarkan 3 tuntutan terhadap pemerintah, diantaranya menuntut pemerintahan yang didasarkan oleh hukum, kemandirian pengadilan, serta pembatasan tindakan dari Mukharabat (sebutan polisi Suriah) agar tidak sewenang-wenang. Hal ini menjadi sangat mengherankan dimana demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ternyata tidak terpenuhi di Suriah yang secara hukum menganut demokrasi.

Suriah dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad tidak mengalami perkembangan apapun seperti apa yang diharapkan masyarakat pada awal pencalonan Bashar Al-Assad, seperti masih terbatasnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Kekecewaan masyarakat ini telah menyebabkan Rezim Bashar Al-Assad sedikit mendapatkan legitimasi dari masyarakat Suriah, Namun meskipun jelas bahwa Bashar dalam kepemimpinannya tidak mendapat legitimasi dan menentang nilai-nilai demokrasi tetapi dengan sangat mengherankan Bashar masih dapat terus memimpin.

Adanya fakta bahwa pemerintahan Bashar Al-Assad masih mampu bertahan mengalami goncangan internal maupun eksternal pemerintah telah menimbulkan sebuah Tanya besar mengenai sosok Bashar Al-Assad serta faktor pendorong

pemerintahannya sehingga Bashar tetap mampu memegang dan mempertahankan kekuasaan di Suriah selama 15 Tahun meskipun tidak memiliki legitimasi dan menyebabkan kekacauan besar di Suriah pada masa dimana seluruh dunia menyuarkan demokrasi serta terjaminnya Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka pokok permasalahan yang ingin diteliti ialah Mengapa Bashar Al-Assad mampu mempertahankan kekuasaannya di Suriah 2011-2016?

C. Landasan Teoris

Landasan teori serta konsep akan membantu menjelaskan fenomena-fenomena diatas, teori menurut Mohtar Mas'oeed merupakan pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, serta konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu Objek, atau suatu fenomena tertentu atau juga bisa berarti suatu kata yang melambangkan suatu gagasan. Disini berarti teori dan konsep digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena bertahannya kekuasaan Bashar Al-Assad di Suriah.

1. Konsep Legitimasi

Legitimasi merupakan konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemimpin dengan bukan pemimpin dalam hal yang menyangkut

keyakinan moral yang membenarkan hak untuk memanfaatkan kekuasaan³. Legitimasi ini juga seringkali menjadi masalah di Timur Tengah dimana para pemimpin yang berkuasa kurang mendapatkan legitimasi dari masyarakat namun masih tetap mampu berkuasa seperti dalam kasus Suriah.

Menurut Charles F. Andrain terdapat beberapa tipe legitimasi diantaranya legitimasi tradisional (berdasarkan nilai-nilai primordial), ideologis (berdasarkan tujuan akhir), personal (berdasarkan nilai personal), prosedural (berdasarkan hukum atau aturan), instrumental (berdasarkan keahlian/prestasi) dimana setiap tipe-tipe legitimasi ini memiliki sumber wewenang dan obyek kepatuhan yang berbeda-beda. Legitimasi yang didapatkan Bashar dalam kasus kepemimpinan Bashar Al-Assad di Suriah dapat dijelaskan melalui tipe legitimasi tradisional, dimana maksud dari legitimasi tradisional adalah bahwa para penguasa mengklaim hak untuk berkuasa atas orang lain yang bersumber dari nilai-nilai primordial (sifat-sifat keturunan yang ada dimasyarakat) kaum elit ini memerintah berdasarkan keyakinan-keyakinan lama. Individu dalam hal ini masyarakat menerima hal tersebut sebagai hal yang dibenarkan secara moral dan memang begitu seharusnya karena hal tersebut memang sudah seperti itu sejak dulu⁴.

³

Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya hal 208.

⁴

Andrain, C. F, Loc.Cit.

Suriah yang sejak tahun 1970 mulai dikuasai oleh Hafez Al-Assad mulai mengarah kepada legitimasi tradisional. Melihat peralihan kekuasaan dari Hafez ke Bashar atau ayah ke anak ini seperti terdapat benang merah antara Bashar yang menggantikan 30 tahun masa kepresidenan ayahnya dengan legitimasi yang didapatkannya. Dimana masyarakat memberikan legitimasi begitu saja kepada seseorang yang dianggap merupakan keturunan raja karena hal ini dianggap wajar dan merupakan suatu yang memang begitu seharusnya. Nilai-nilai primordial dalam legitimasi ini dapat dipahami dari konsep Ashabiyah dimana adanya paham Ashabiyah di Suriah juga memberikan pengaruh dalam legitimasi yang dimiliki Bashar Al-Assad. Legitimasi di Suriah juga bisa dipahami melalui teori Neo-Patrimonialism dimana adanya keterkaitan antara legitimasi di Suriah dengan sistem pemerintahan di Suriah.

2. Konsep Ashabiyah

Legitimasi tradisional dalam kasus kepemimpinan Bashar Al-Assad dipengaruhi dengan adanya paham Ashabiyah dimana paham Ashabiyah ini mempengaruhi bertahannya kekuasaan Bashar Al-Assad. Michael C. Hudson yang mengatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara struktur kekeluargaan dengan bentuk keabsolutan kekuasaan dari pemerintahan pusat⁵.

⁵ Hudson, M. C. (1977). *Arab Politics The Search for Legitimacy*. New York: The Vail-Ballou Press, Inc., Binghamton.

Timur Tengah merupakan wilayah dimana masyarakatnya memiliki berbagai bentuk kesetiaan yang selalu dipertahankan. Diantara berbagai bentuk kesetiaan itu ialah Ashabiyah. (kesetiaan terhadap keluarga), Qaumiyah (kesetiaan kepada suku) Wathaniyah (kesetiaan kepada negara), ummah (kesetiaan kepada ummat seagaman). Ashabiyah adalah paham untuk lebih mengutamakan kesetiaan terhadap keluarga atau paham tertentu, ideologinya, partainya, kelompoknya dan lain sebagainya⁶. Menurut Ensiklopedia Islam Ashabiyah berarti “semangat kekeluargaan” yang menurut Michael C. Hudson Ashabiyah mengarah kepada hubungan antar keluarga atau suku yang terikat oleh rasa solidaritas yang mengikat satu sama lain serta berkerjasama dalam menentang tekanan dari pihak luar⁷.

Para penganut Ashabiyah ini menganggap bahwa keluarga, keturunan serta apapun yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga dan keturunan dianggap yang paling terbaik dan harus dipertahankan. Sehingga adanya kecenderungan di Timur Tengah bahwa bertahannya kekuasaan seseorang dipengaruhi oleh dukungan kuat keluarga yang disebabkan kekuatan rasa ikatan kekeluargaan. Melalui Ashabiyah ini tak jarang para pemimpin di Timur Tengah juga mendapatkan legitimasi untuk memimpin, dimana biasanya masyarakat akan beranggapan bahwa merupakan hal wajar bagi darah keturunan Raja untuk meneruskan kekuasannya tanpa perlu meminta persetujuan rakyat.

⁶ DR. Sidik Jatmika, M. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Maharsa hal 43.

⁷ Hudson.M.C,Opt.Cit. hal 35

Di Timur Tengah banyak keluarga yang memegang peranan penting dalam politik seperti keluarga Bani Saud di Saudi, Bani Hasyim di Yordania, al-Sabah di Kuwait, termasuk juga keluarga Al-Assad di Suriah. Pemerintahan Bashar Al-Assad dipenuhi oleh keluarganya yang memegang posisi penting dipemerintahan seperti Atef Najib kepala keamanan di Da'raah sebuah tempat dimana demonstrasi pertama kali dilakukan pada 2011, Atef Najib ini merupakan sepupu Assad.

Di Suriah juga terlihat pengaruh paham Ashabiyah dalam kekuasaan Bashar Al-Assad dimana Terdapat garis besar antara kemampuan Bashar dalam mempertahankan keluarganya dengan paham Ashabiyah ini, Bashar yang merupakan seorang muslim Syi'ah dari sekte Alawi banyak mendapat bantuan dari keluarganya ditambah lagi adanya kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Suriah adalah Sunni sehingga dengan begitu kewajiban dan rasa perjuangan bersama keluarga Syiah akan memberikan bantuan-bantuan kepada Bashar untuk mempertahankan kekuasaan Syiah di Suriah.

3. Neo-Patrimonialism.

Menurut Bratton dan Van de Walle, Neo-Patrimonialism merupakan "Sistem politik dimana sistem pemerintahan dikuasai oleh satu orang yang mengendalikan institusi resmi negara. Hak-hak untuk menentukan kebijakan suatu negara dalam

Neo-Patrimonialism berada ditangan rezim yang berasal dari individu dan bukan berada di institusi resmi negara seperti yang tertulis didalam undang-undang⁸.

Menurut Carmen Becker dalam Jurnalnya yang berjudul *Strategies for power consolidation in syriah under Bashar Al-Asad*, Neo-Patrimonialism merupakan model pemerintahan terpusat yang dibangun dengan hubungan yang vertikal antara hubungan sosial dan pembagian sumber daya, kata “Patriach”- pemimpin ataupun grup yang berkuasa- merupakan pusat dari sistem pembuatan keputusan melalui hubungan personal⁹. Kata *Patriarchal* menurut Michael.C.Hudson mengarah kepada pentingnya rasa kekeluargaan dalam masyarakat arab. Ini menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara pemegang kekuasaan dengan grup yang berkuasa atau bisa disebut juga dengan senior elit dalam membuat keputusan dalam negara.

Neo-Patrimonialism merupakan bagian dari rezim dimana senior elit memegang peranan penting dalam menjalankan institusi negara. Senior elit ini memiliki kemampuan dalam mengatur kemana jalan pemerintahan untuk mempertahankan *power*. Para senior elit ini berada dalam lingkaran pemimpin yang berada dalam setiap institusi negara dimana institusi ini menjadi bagian penting

8

Stacher, J, Op.Cit hal. 200.

9

Becker, C. (2006). *strategis for power consolidation in Syriah under Bashar Al-Assad : Modernizing control overresources. Arab Studes Journal*, 3.

dalam menjalankan partai yang dapat mengatur kebijakan politik dan mencegah perpecahan dalam elit.

Di Suriah bentuk-bentuk paham Neo-Patrimonialism ini terlihat dari penguasaan partai politik yaitu partai Ba'ath dan militer yang semuanya berada dalam kekuasaan Bashar Al-Assad dan senior elit yang mendukung Bashar. Partai Ba'ath merupakan partai yang telah didominasi oleh senior elit yang didominasi oleh sekte Alawi bahkan masyarakat Suriah sendiri berpikir bahwa Partai Ba'ath merupakan agenda tersembunyi dari sekte Alawi untuk menguasai Suriah melalui sistem satu partai yang dikuasai oleh Alawi. Selain partai Ba'ath, Neo-Patrimonialism juga dapat dilihat dari penguasaan militer oleh kaum Alawiy di Suriah dimana orang-orang Alawiy mengisi posisi-posisi penting kemiliteran di Suriah, penguasaan militer ini seperti pembuka jalan bagi minoritas Alawiy untuk memperkuat posisinya di Suriah.

Dengan banyaknya senior elit Alawi yang memiliki posisi penting dalam partai ba'ath dan militer maka semakin mudah bagi sekte Alawi untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan mendukung semua kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan rezim Bashar Al-Assad. Peranan elit disetiap institusi negara dalam memperjuangkan ketahanan suatu rezim digambarkan oleh Gandhi dengan ungkapan "mulai sekarang, menjadi sangat jelas bahwa diktator tidak memerintah sendiri, mereka memerintah dengan institusi yang memiliki kepentingan yang sama".

4. Konsep Aliansi

Aliansi merupakan konsep yang sering kali didengar dalam hubungan internasional. Banyak para penulis yang mengartikan konsep aliansi sebagai kerja sama antar negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan arti katanya yang diambil dari Webster's Encyclopedia ada beberapa arti dari kata Aliansi diantaranya *the state of being allied* (negara-negara yang bersekutu), *a bond or connection between families, parties, or individuals* (ikatan atau hubungan antara keluarga, partai, maupun individu), *an association (as by treaty) of two or more nations to further their common interest* (persatuan yang berdasarkan kesepakatan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama), *a treaty of alliance* (perjanjian untuk beraaliansi)

Dalam sejarahnya kata aliansi ini diambil dari bahasa German "Allianz) yang dikembangkan pada abad ke 17 yang berakar dari kata Prancis (alliansi) yang berarti hubungan, perjanjian, asosiasi antar negara-negara. Menurut George Liska: Aliansi merupakan asosiasi resmi antar dua atau lebih negara menentang ancaman dari pihak ketiga, dimana bisa berarti menentang sesuatu atau seseorang. Menurut Ole Holsti, Terrence Hopmann, John Sullivan Aliansi merupakan a formal treaty between nation-states concerned with national security issues (kesepakatan resmi antar negara-negara yang berkonsentrasi pada isu-isu keamanan nasional) menurut ke tiga ilmuwan yang berfokus pada konsep Aliansi tersebut, aliansi setidaknya memiliki 3 syarat diantaranya : merupakan perjanjian resmi baik secara rahasia maupun terbuka,

merupakan sebuah perjanjian yang langsung mengarah kepada isu keamanan, dan merupakan kesepakatan antar negara¹⁰.

Robert Nye menjelaskan bahwa aliansi merupakan kesepakatan formal ataupun informal antara negara-negara yang dilakukan untuk menjaga keamanan bersama. Sedangkan menurut Griffiths dan Terry Aliansi berarti kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk berkerjasama dalam isu-isu keamanan. Disini dapat dipahami bahwa aliansi berarti kesepakatan antar negara yang dibuat untuk menjaga keamanan, contoh aliansi yang sangat terkenal yaitu NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang dibuat untuk menjaga keamanan bersama.

Dalam Menjaga kekuasaan suatu Rezim suatu negara membutuhkan dukungan internasional yang didapatkan melalui Aliansi. Suriah dibawah kekuasaan Bashar Al-Assad merupakan negara yang melakukan aliansi dengan Rusia, Cina, dan Iran. Hubungan Suriah dengan ke tiga negara ini sangat dekat terlebih lagi setelah Suriah mengalami perang sipil dimana Suriah mulai membangun aliansi yang sangat baik dengan ketiga negara tersebut. Aliansi antara Suriah, Rusia, Cina dan Iran merupakan bentuk aliansi keamanan dimana negara-negara ini saling bekerjasama menjaga keamanan Suriah untuk mempertahankan pemerintahan Bashar Al-Assad.

10

Bergsmann, S. (n.d.). The Concept of Military Alliance.

Aliansi yang merupakan kerjasama dalam isu-isu keamanan negara ini mempengaruhi bertahanya rezim di Suriah, dimana Suriah memanfaatkan aliansi yang dibangunnya dengan Rusia, Cina, Iran untuk mendapatkan dukungan internasional sehingga rezimnya dapat kebal terhadap ancaman-ancaman oposisi yang ingin menggulingkan rezim. Menurut Steven Heydemann Pemerintahan Suriah menggunakan strategi dan diplomasi yang sangat baik dengan Rusia dan Cina dimana hubungan ini memberi rezim berbagai sumber daya bantuan militer dan finansial serta sebagai advokat yang dapat bertindak atas nama Suriah dalam institusi internasional¹¹.

Menurut Amy Docker dalam essaynya yang berjudul *Syria : Assad Hangs on* menuliskan bahwa Suriah di mulai dari masa Hefez Al-Assad memenangkan dukungan Rusia untuk mengatur dan meningkatkan posisinya sebagai pemimpin, dimana Hefez Al-Assad telah mengatasi kegagalan domestik dengan politik luar negerinya. Keterlibatan Russia, Iran dan Cina dalam perang sipil di Suriah mengacu dalam berbagai bidang terutama politik, militer, serta dukungan terhadap partai yang mempengaruhi berlangsungnya konflik di Suriah sejak 2011¹².

11

Heydemann, S. (2013). Syria and the Future of Authoritarianism. *Journal of Democracy*, 63.

12

wikipedia.com. (n.d.). Retrieved 11 7, 2011, from https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_involvement_in_the_Syrian_Civil_War

Pemerintahan Bashar Al-Assad yang terus mendapatkan bantuan dari Rusia, Cina dan Iran membuat rumit upaya oposisi untuk menggulingkan rezim di Suriah. Rusia yang tanpa ragu membombardir Suriah telah menyebabkan banyak kematian masyarakat Suriah serta merusak fasilitas umum di Suriah sehingga masyarakat maupun oposisi semakin sulit untuk berkumpul maupun menyatukan kekuatan untuk menentang rezim. Rakyat sudah tidak dapat berbuat banyak terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang sudah tidak memiliki legitimasi lagi sehingga meskipun Bashar secara *de facto* sudah tidak memiliki legitimasi namun Bashar masih tetap dapat memegang kekuasaan di Suriah.

D. Hipotesis

Kemampuan Bashar Al-Assad dalam mempertahankan rezimnya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong Bashar dalam mempertahankan rezimnya, faktor-faktor keberhasilan Bashar Al-Assad ini dapat dibagi menjadi internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

- a. Bashar Al-Assad memanfaatkan legitimasi primordial dengan menggunakan Ashabiyah (ikatan rasa kekeluargaan) yaitu melalui sensitifitas ikatan kekeluargaan Alawi untuk mempertahankan kekuasaannya di Suriah.
- b. Bashar Al-Assad memanfaatkan Neo-Patrimonialism dengan menguasai militer dan politik serta menempatkan orang-orang yang berasal dari sekte

alawi untuk memenuhi berbagai posisi didalam partai Ba'ath sehingga dapat memperkuat benteng pertahanan rezimnya.

2. Faktor Eksternal

- a. Bashar Al-Assad mendapatkan dukungan dengan melakukan Aliansi bersama Rusia, Cina, dan Iran dimana ketiga negara ini terus mensuplai kebutuhan militer maupun finansial pemerintahan Bashar yang mempersulit oposisi untuk menggulingkan rezim Bashar.

E. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai penyebab dibalik berhasilnya Bashar Al-Assad dalam mempertahankan rezim otoriter selama 15 tahun meskipun mendapat tekanan dari internal dan maupun eksternal.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana Penulis melengkapi data dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara menghimpun data-data yang didapatkan dari literasi seperti buku, jurnal, Koran yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian melakukan analisa terhadap data-data yang tersedia untuk kemudian dilakukan penjelasan atau eksplanasi terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 merupakan bagian penelitian yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang konflik sosial politik Suriah serta sosok Bashar Al-Assad

BAB III membahas mengenai tekanan-tekanan terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad.

BAB IV membahas tentang faktor-faktor pendorong berhasilnya Bashar Al-Assad dalam mempertahankan rezim

BAB V merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun penulis.